

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI DESA SOSOK KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN
SANGGAU**

Oleh :

HANDRI WIRANATA^{1*}

NIM. E1012141051

Azrita Mardhalena^{2*}, Dhidik Apriyanto^{2*}

*Email: e1012141051@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TanjungpuraPontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TanjungpuraPontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Peraturan Bupati Sanggau Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, adapun metode penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan jenis penelitian pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Jones (dalam subarsono 2006:46) yang membahas tiga tahapan dalam proses implementasi yaitu 1).Pengorganisasian, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program. Pengorganisasian disini adalah birokrasi sebagai alat pembaharuan yang melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan sosial, ekonomi di mana pemerintah harus mempunyai pranata yang mudah menerima inovasi baru yang bermanfaat bagi pembangunan. 2). Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Di samping itu interpretasi juga dapat diartikan sebagai penafsiran dalam memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan dalam pembuatan kebijakan. 3). Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program atau penerapan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu sebuah proses yang rumit karena berhubungan dengan kebijakan lainnya. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pelaku-pelaku program Jamkesda harus dapat menjalankan peranannya dengan baik seperti pelayanan terhadap pasien sesuai dengan ketentuan program, seperti pelaksanaan pendataan data terhadap penduduk miskin haruslah berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan partisipatif, sehingga pelaksanaan program Jamkesda menjadi tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Jamkesda

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kesehatan adalah hak bagi setiap penduduk di daerah, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Pemerintah wajib mendukung dan menciptakan masyarakat yang sehat sesuai undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh kelayakan kesehatan.

Upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah di bidang kesehatan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah jaminan kesehatan daerah sesuai dengan peraturan Bupati sanggau No 2 Tahun 2018 tentang perubahan ke kedua atas peraturan bupati sanggau No 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah. Disebutkan tujuan program jaminan kesehatan daerah adalah program jaminan

bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan diberikan pemerintah daerah kabupaten atau provinsi untuk menjangkau warga yang kurang mampu dan yang belum memiliki jamkesmas atau BPJS, program jaminan kesehatan daerah merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat khususnya di desa-desa.

Dengan adanya program jaminan kesehatan daerah ini dapat meningkatkan mutu kesehatan setiap masyarakat yang ada di desa-desa. Karena tingkat kesehatan masyarakat di desa-desa sangat rendah dikarenakan pola makan yang tidak baik dan pemenuhan gizi dalam tubuh yang tidak terpenuhi secara optimal, bahkan jika masyarakat ada yang mengalami sakit dan harus dirawat di rumah karena masyarakat tidak memiliki biaya untuk membayar rumah sakit atau dokter.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Bupati Sanggau Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah di Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau:

1. sulitnya untuk mengakses informasi dalam Program jaminan kesehatan daerah yang membuat masyarakat kesulitan menggunakan program jaminan kesehatan daerah di desa sosok.
2. fasilitas pelayanan jaminan kesehatan daerah seperti promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitative sangat kurang memadai sehingga menyebabkan program jaminan kesehatan daerah di desa sosok menjadi terkendala.
3. pelayanan seperti obat-obatan yang terkendala dikarenakan obatnya tidak lengkap sehingga beberapa pasien harus menunggu atau pergi ke kota sanggau dengan jarak yang lumayan jauh untuk mendapatkan pelayanan obat-obatan

3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian, maka penulis memfokuskan masalahnya pada: proses implementasi peraturan bupati sanggau No 2 Tahun 2018 Bab 3 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah di desa sosok kecamatan tayan hulu kabupaten sanggau.

4. Rumusan Masalah

Mengacu kepada permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang masalah, sebagai suatu dasar kerangka dasar pemikiran dalam penelitian permasalahan yang di hadapi ini maka selanjutnya dirumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

Bagaimana proses implementasi peraturan bupati sanggau sanggau No 2 Tahun 2018 bab 3 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah di desa sosok kecamatan tayan hulu kabupaten sanggau.

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

mendesripsikan atau menggambarkan proses implementasi peraturan bupati sanggau No 2 Tahun 2018 bab 3

pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah didesa sosok kecamatan tayan hulu kabupaten sanggau , baik dilihat dari pengorganisasian, interpretasi, maupun aplikasi

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teoritis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan umumnya bagi perkembangan ilmu administrasi dan khususnya bagi program studi ilmu administrasi publik kajian kebijakapublik
- b. Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagipemerintahkabupatensanggau terutama bagi program jaminan kesehatan daerah ini khususnya didesasosok.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Untuk memahami suatu kebijakan menurut Tachjan (2006:19) yaitu ada dua cara:

1. Pemahaman suatu policy melalui substansinya yakni rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan /goals yang hendak dicapai.
2. Memahami suatu policy dari proses pelaksanaannya yang membeberkan kepada kita hasil maupun dampak dari kebijakan tersebut, baik hasil yang bersifat sementara maupun yang final.

Dari berbagai batasan yang ada, pada prinsip kebijakan publik adalah sekelompok rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial ekonomi. Batasan lain adalah

bahwa kebijakan publik merupakan produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012:21), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tidak semua kebijakan memerlukan proses implementasi, ada kebijakan yang secara otomatis akan terimplementasi dengan sendirinya begitu kebijakan tersebut diputuskan atau yang disebut *self-implementation*. Kemudian Repley (dalam Kusumanegara, 2010:88), menyatakan suatu kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan, dikatakan berhasil (efektif dilaksanakan) jika telah memenuhi tiga cara dominan sebagai berikut: (1) diukur dengan tingkat kepatuhan birokrasi di tingkat bawah terhadap birokrasi di atasnya; (2) lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi; (3) mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampaknya yang dikehendaki dari sasaran-

sasaran program yang ada.

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:789) diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Kunarjo (2013: 89) program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek. Sementara itu menurut Jones (2006: 25) program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumber-sumberdaya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern. Selanjutnya Munir (2012:11) menyatakan bahwa program sendiri terdiri dari berbagai macam, program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi juga ruang lingkup, isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam

2. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir

Judul
Implementasi peraturan Bupati Sanggau Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Desa Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau

Masalah Penelitian

- Sulitnya untuk mengakses informasi dalam program jamkesda yang membuat masyarakat kesulitan menggunakan jamkesda didesa sosok.
- Fasilitas pelayanan jaminan kesehatan daerah yang minim seperti promotif (promosi/informasi), kuratif (pencegahan), preventif (penyembuhan), dan rehabilitatif (pemulihan) sehingga menyebabkan program jaminan kesehatan daerah ini terkendala
- Pelayanan seperti obat-obatan sangat minim dikarenakan obatnya tidak lengkap sehingga beberapa pasien harus menunggu

TEORI
Implementasi Program Jones (dalam subarsono 2006:46)

1. Pengorganisasian
2. Interpretasi
3. Aplikasi

Output

Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Desa Sosok Bidang Kesehatan melalui pelaksanaan Jamkesda

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan proses implementasi peraturan bupati sanggau No 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah didesa sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau berdasarkan data dan fakta. Kemudian menceritakan dan menggambarkan suatu obyek secara rinci dan mendalam, penelitian tidak hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi data tersebut diolah lebih lanjut dengan tidak melakukan pengujian hipotesis, seperti yang dikatakan Moleong (2010:6) bahwa penelitian deskriptif bertujuan “mendeskripsikan objek yang diteliti dengan mengeksplorasi data dan fakta yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secaranyata

D. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

1. Pengorganisasian program jamkesda

Pada era otonomi daerah, harapan masyarakat Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus diperjuangkan. Dikeluarkannya kebijakan tentang program jaminan kesehatan daerah dikabupaten sanggau diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sanggau “terwujudnya masyarakat kabupaten sanggau yang berkualitas, mandiri dan sejahtera dalam rangka efektivitas pelaksanaan program pemeliharaan jaminan kesehatan daerah.

Secara organisasi puskesmas merupakan salah satu organisasi kesehatan fungsional yang berada di daerah kecamatan, yang tentunya memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok serta juga membina peransertamasyarakat pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan daerah yang dilakukan puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kuratif, preventif, promotif, dan

dan rehabilitative.

Jaminan kesehatan Daerah merupakan suatu cara penyelenggaraan untuk program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat desa sosok yang belum tercakup dalam jaminan kesehatan lainnya yang paripurna dan berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya. Dalam perkembangannya mengenai program tersebut secara implementatif masih menghadapi permasalahan sehingga belum semua pemakai jasa kesehatan (pasien) merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu diperlukan upaya pemberdayaan melalui pendampingan kepada keluarga yang tidak mampu merupakan proses mendorong, menyemangati, membimbing dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu. Diketahui bahwa secara pengorganisasian pelaksana program jamkesda tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi.

. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Kenyataan ini dapat dilihat dengan serangkaian upaya yang dilakukan petugas yaitu menampung dan mengevaluasi sejumlah permasalahan yang ditemui untuk dicari solusi pemecahannya masih menunggu petunjuk dari atasan dengan melibatkan anggotanya. Secara organisasi, pelaksanaan pelayanan pengguna jasa jaminan kesehatan daerah yang dilakukan puskesmas Sosok Kecamatan Tayan Hulu adalah merangsang masyarakat keluarga miskin untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri dan memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang merubah perilaku dalam meningkatkan derajat kesehatan. Sehingga dalam meningkatkan mutu kualitas diperlukan adanya komunikasi baik dari pihak puskesmas maupun pihak dari pengguna jamkesda itu sendiri sehingga akan tercapainya tepat sasaran.

Berdasarkan peraturan Bupati Sanggau No 2 Tahun 2018 bab 3 pasal 4 ayat 1 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah, dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda antar pelaksana dengan pengguna jasa kesehatan. Kondusifnya suasana lingkungan kerja rumah sakit umum daerah dan puskesmas di Kabupaten Sanggau, termasuklah Puskesmas Sosok Kecamatan Tayan Hulu pada umumnya, yang memungkinkan pelayanan terhadap para pengguna jasa kesehatan dilembaga tersebut dapat terlayani dengan baik.

2. Interpretasi Program Jamkesda

Interpretasi merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Untuk meningkatkan mutu dalam program jamkesda itu sendiri

Dalam rangka meningkatkan interpretasi yang efektif, maka usaha meningkatkan mutu atau kualitas penyampaian informasi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Implementasi program jaminan kesehatan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat didesa sosok yang belum memiliki jaminan kesehatan yaitu melalui penyampaian informasi dengan mensosialisasikan aturan suatu kebijakan kepada masyarakat mengenai Peraturan Bupati Sanggau No 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah diKabupaten Sanggau dengan memberikan pelayanan secara komunikatif.

Pemahaman masyarakat Desa Sosok terhadap program Jamkesda, tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan sosialisasi atau penyebaran informasi mengenai pelayanan pengguna jasa Jamkesdadalam meningkatkan derajat kesehatan kepada seluruh masyarakatDesa Sosok yang kurang mampu. Untuk meciptakan pemahaman masyarakat maka sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan, adanya

informasi atau penjelasan kepada masyarakat penggunaan pelayanan tentang ketentuan kondisi kesehatan masyarakat yang lebih kritis yang didahulukan.

Keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh puskesmas didesa Sosok Kecamatan Tayan Hulu, pada hakekatnya berkaitan dengan hasil (*outcome*) dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Tayan Hulu dalam melayani masyarakat. Program jaminan kesehatan daerah yang dikakukan Puskesmas Kecamatan Tayan Hulu Desa Sosok merupakan pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan karena mempunyai daya ungkit yang besar terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat DesaSosok.

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pengguna jasa Jamkesda di Puskesmas sosok kecamatan tayan hulu, masyarakat yang datang harus melalui prosedur pelayanan, keberadaan prosedur dan aturan akan sangat penting bagi keberlangsungan pelayanan itu sendiri, karena prosedur akan

menjadi standard internal bagi puskesmas Sosok Kecamatan Tayan Hulu untuk menjadi acuan bagi para petugas dalam menjalankan tugas- tugas internal.

Meskipun sudah ada sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Sanggau melalui dinas Kesehatan Mengani Peraturan Bupati No 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah, Tetapi dengan semangat yang ada, masyarakat akan lebih dimudahkan dan sasarannya juga lebih jelas, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi-fungsi dapat diwujudkan dengan menggerakkan pembangunan pedesaan yang berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat dankeluargauntuk hidup sehat. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui yang mereka kerjakan, pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga implementasi program Jaminan Kesehatan Daerah harus dikomunikasikan dengan pihak yang tepat. Dan tericpatnya pelayanan jamkesda yang tepat sasaran untuk menunjang kesehatan masyarakat yang layak dalam kesejahteraan kesehatan.

3. Apkikasi / Penerapan Program Jamkeda

Sebagai lembaga pelayanan kesehatan, Puskesmas Sosok Kecamatan Tayan Hulu dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memanfaatkan pelayanan tersebut. Tugas dan fungsi lembaga pelayanan yang demikian ini sering disebut dengan istilah obyektif, yaitu suatu keadaan dimana suatu organisasi (lembaga) harus menjalankan tugas dan fungsinya seperti diatur oleh peraturan-peraturan organisasitersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau No 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Sanggau adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasarkesehatan yang diberikam kepada setiap orang yang telah iuran atau yang membutuhkan pelayanan kesehatan oleh pihak puskesmas itu sendiri.

urannya dibayar oleh pemerintah daerah. Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sanggau mempunyai system kerja, yaitu: 1) kepesertaan terbuka, artinya setiap masyarakat kabupaten sanggau berhak menjadi peserta jaminan kesehatan daerah sepanjang belum memiliki jaminan kesehatan, 2) setiap kartu jamkesda hanya berlaku untuk satu jiwa, 3) jaminan kesehatan diberlakukan kepada masyarakat yang telah memiliki kartu jamkesda kabupatensanggau, 4) kartu jamkesda kabupaten sanggau diterbitkan oleh kantor pelayanan dan perizinan terpadu (KP2T) kabupatensanggau.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta jamkesda harus menunjukkan kartu jamkesda yang keabsahan kepesertaannya, merujuk kepada daftar masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Sanggau, pengguna jasa jamkesda diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberiannya ditetapkan oleh pemerintah daerah, karena jamkesda merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, atau hanya diperuntukkan bagi seseorang yang dimana kondisi ekonominya sangat lemah, pemakaian jamkesda dapat dilakukan dimana saja baik

diklinik, puskesmas atau dirumah sakit yang ada berada dikabupaten sanggau.

Pada hakekatnya pelayanan terhadap masyarakat yang kurang mampu adalah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi/kabupaten/kotaberkeajiban memberi kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Program jamkesda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah daerah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin dimulai dengan pengembangan program jamkesda

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dan sesuai hasil temuan diobjek penelitian tentang Proses

implementasi Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, maka sesuai parameter yang ditetapkan dalam sub fokus penelitian ternyata secara implementatif belum semuanya terlaksana secara maksimal, dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai esensi implementasinya secara substansial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengorganisasian program Jaminan kesehatan Daerah dalam bab 3 pasal 4 ayat 1 masih kurang optimal, dimana peran dan fungsi kerja pelayanan kesehatan masih belum berjalan sebagaimana seharusnya. Rendahnya komitmen dari dinas kesehatan sebagai penanggung jawab pengelolaan jaminan kesehatan di daerahnya. Oleh karena itu belum semua pemerintah kabupaten sanggau mempunyai komitmen dalam pendanaan jaminan kesehatan daerah diluar kuota, sedangkan yang sudah mempunyai pendanaan pengelolaan belum seluruhnya mengikuti mekanisme jamkesda.
- 2) Interpretasi atau pemahaman masyarakat dalam Bab 3 pasal

4 ayat 1 Desa Sosok pengguna jamkesda masih rendah. Hal tersebut disebabkan minimnya pelaksanaan sosial program jamkesda dalam satu tahun hanya satu kali pertemuan yang dilakukan tim pelaksanaan program (implementor), karena terlihat masih ada masyarakat pengguna jasa jamkesda yang ada. ayat 1 Desa Sosok pengguna jamkesda masih rendah. Hal tersebut disebabkan minimnya pelaksanaan sosial program jamkesda dalam satu tahun hanya satu kali pertemuan yang dilakukan tim pelaksanaan program (implementor), karena terlihat masih ada masyarakat pengguna jasa jamkesda yang ada. belum dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai program jamkesda seperti informasi mengenai manfaat dan penggunaan pelayanan jamkesda

Aplikasi atau penerapan program Jamkesda dalam bab 3 pasal 4 ayat 1 kepada masyarakat Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap peningkatan derajat kesehatan belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin yang ada di Desa Kecamatan Tayan Hulu. Hal terlihat dalam

pelaksanaanya jarang melibatkan aparaturnya kecamatan atau desa, maka sering terjadi salah pendataan data terhadap warga miskin atau belum sepenuhnya tepat sasaran penerima manfaat, yaitu keluarga miskin yang seharusnya mendapatkannya.

2. Saran

implementasi Peraturan bupati Sanggau Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Desa Sosok Kecamatan TayanHulu Kabupaten Sanggau diperlukan penyikapan dari semua pihak yang terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Untuk mengatasi hambatan yang ada penulis memberikan saran sebagai berikut:

1) Dalam rangka melakukan pengorganisasian Tim pelaksana program Jamkesda (*implementor*), baik pihak puskesmas, maupun Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pelaksana program jamkesda, sedapat mungkin pihak-pihak yang terlibat mempunyai komitmen seperti pendataan secara cermat dan tepat sasaran sehingga tidak adanya Ktp ganda, orang yang

sudah meninggal, masyarakat yang tergolong mampu mendapatkan pelayanan kesehatan pengguna jasa jamkesda

2) Dalam rangka meningkatkan interpretasi atau pemahaman masyarakat terhadap program jamkesda, maka tim pelaksana program perlu melakukan sosialisasi bersama-sama dengan pihak desa, agar dengan melalui sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jamkesda, terutama mengenai proses pendistributsian jamkesda agar berjalan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu perlu diperhatikan factor akuntabilitas, dengan melakukan pendataan yang tepat sasaran, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat yang berhak menerima jasa jamkesda maupun pihak yang berkepentngan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati. Bersama guna menunjang untuk kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatab masyarakat

3) Dalam rangka meningkatkan aplikasi atau penerapan program jamkesda kepada masyarakat Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu, maka pelaku-pelaku program jamkesda dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan program seperti pelaksanaan pendataan data terhadap penduduk miskin haruslah berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan partisipatif, sehingga pelaksana program jamkesda tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, dan meningkatkan pelayanan jamkesda di puskesmas sosok hendaknya pihak puskesmas sosok perlu melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan pelayanan jasa kesehatan jamkesda, baik menyangkut fasilitas kesehatan, ruang perawatan, ruang kerja administrative, dan tata ruang, maupun kebersihan.

F. REFERENSI Buku-buku:

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan public*. Bandung: Alfabeta.

Departemen Pendidikan RI. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.

Islamy, M. Irfan. 2006. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Koncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan..* Edisi I. Yogyakarta: UPPAMPYKPN.

Kunarjo. 2013. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Munir, Badrul. 2012. *Perencanaan Pembangunan Daerah*

- Prespektif Otonomi Daerah*. Mataram: BAPPEDA Propinsi NTB.
- Moleong, Lexi J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukirno, sadono. 2004. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-UI.
- Soewito. 2005. *Administrasi Modern*. Jakarta: TitikTerang.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, Solichin, Abdul. 2006. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Ne gara.
- SinarGrafika.
- Wibawa, Samodra. 2006. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2006. *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial, UGM
- Dokumen Pemerintah :**

Undang-Undang Nomor: 36
Tahun 2009, tentang *Kesehatan*
peraturan Bupati Sanggau No
2 Tahun 2018 tentang perubahan

kedua atas peraturan Bupati
Sanggau No 10 Tahun 2016
tentang penyelenggaraan program
Jaminan kesehatan daerah.

